



SENIN, 06 MEI 2024

SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu

KATEGORI BERITA:



POSITIF



NETRAL



NEGATIF

Bawa Bengkulu Utara 7 Kali Berturut-Turut WTP Bupati Mian Dapat Nilai Terbaik Dari BPK

ARGA MAKMUR - Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Bupati Bengkulu Utara Ir. H Mian. Di bawah tangan dinginnya Kabupaten Bengkulu Utara meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tujuh kali berturut-turut.

Opini ini diterima Bupati Ir. H Mian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Bengkulu Jumat 3 Mei lalu. Tak hanya itu, yang lebih membanggakan lantaran Bengkulu Utara mendapatkan opini WTP dengan nilai tindak lanjut tertinggi.

Badan Pemeriksa Keuangan memberikan nilai 91.39 Persen dalam hal tindak lanjut pemeriksaan yang merupakan nilai tertinggi di Provinsi Bengkulu. Bupati Mian menegaskan jika opini WTP untuk ketujuh kalinya secara berturut-turut ini sebagai bentuk komitmennya dalam membangun Bengkulu Utara.

Mian bukan hanya berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih sejak awal memimpin Bengkulu Utara.

Namun ia juga menekankan pada seluruh jajarannya untuk mengedepankan sistem pertanggungjawaban dan pelaporan yang akuntabel. "Kita tidak hanya menekankan dan menjadikan pemerintahan bersih sebagai target, namun sistem penyajian pertanggungjawaban dan pelaporan juga harus akuntabel," terangnya.

Ia menegaskan jika dalam pelaksanaan pembangunan pemerintahan di Bengkulu Utara sangat mengedepankan pelaksanaan yang sesuai dengan aturan. Selain itu semua pekerjaan dan pelaksanaan pekerjaan juga wajib memiliki standar dan pengawasan ketat sehingga sesuai dengan kontrak kerja.

"Maka pengawasan juga dilakukan secara rutin agar sesuai dengan kontrak kerja dan apa yang menjadi target pembangunan juga bisa dirasakan masyarakat lebih maksimal," terangnya.

Ia menegaskan jika diraihnya WTP Ke-7 tersebut bukan kerja sendiri pemerintah Bengkulu Utara, ia juga berterima kasih pada Badan Pemeriksa Keuangan yang selama ini sudah banyak melakukan supervisi di Bengkulu Utara.

Hal ini untuk memastikan jika pelaksanaan anggaran harus benar-benar berpegang pada aturan. "Kami berterima kasih dengan BPK yang sudah memberikan bimbingan selama ini, sehingga bukan hanya menghindari terjadinya kesalahan namun juga agar kesalahan yang muncul tidak terjadi kesalahan yang terulang," tegasnya.

Ia menegaskan jika seluruh jajaran harus terus menjaga hubungan dan berkoordinasi dengan dengan tugas pelaksanaan anggaran tersebut. Pasalnya pelaksanaan anggaran tidak terpaku pada saat belanja ataupun pelaksanaan anggaran namun mulai dari sejak perencanaan.

"Sehingga sejak awal penyusunan program harus benar-benar sesuai dengan aturan yang ada hingga akhirnya saat penyajian pelaporan. Sehingga pemerintahan yang akuntabel yang saat ini diterapkan bisa terus dijaga," terangnya.

Sejak memimpin Bengkulu dan mulai mengelola anggaran, Bupati Mian selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian. Ia juga meminta seluruh jajaran OPD terutama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah untuk rutin melakukan bimbingan teknis menyesuaikan aturan terbaru pengelolaan keuangan, pertanggungjawaban dan pelaporan. "Atruan keuangan kerap berubah, dalam pengelolaan anggaran harus terus berpedoman dengan aturan terbaru," terangnya.

Selain itu, sesuai dengan saran Badan Pemeriksa Keuangan dan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemda Bengkulu Utara juga terus memperkuat Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

Inspektorat daerah sebagai APIP terus diperkuat dan diminta melakukan pengawasan maksimal terutama dalam pencegahan terjadinya kesalahan dalam pengelolaan anggaran.

"APIP terus kita perkuat, selain menekankan pada seluruh jajaran untuk patuh pada aturan, namun pengawasan tidak boleh melemah. Melalui APIP pengawasan dalam rangka pencegahan kita kedepankan," ujarnya.

Selain itu, tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Badan Pengawas Keuangan juga terus ditekankan Bupati Mian.

Ia bahkan tak mengambil jeda hingga langsung mengumpulkan seluruh kepala OPD setiap menerima laporan hasil pemeriksaan dari BPK. Hal ini dalam rangka percepatan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan tersebut.

Hal ini yang membuat Bengkulu Utara mendapatkan nilai tertinggi dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dan mendapatkan nilai dengan status terbaik se-Provinsi Bengkulu.

"Apa yang memang menjadi kesalahan, segera dilakukan perbaikan sesuai dengan rekomendasi dari BPK. Bukan hanya menuntaskan tindak lanjut, namun harus ditekankan jika kesalahan serupa tidak boleh kembali terulang kedepannya," tegas Mian. (qia./adv)